

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Inflasi digunakan sebagai tolok ukur kemampuan perekonomian disuatu wilayah ataupun Negara. Terutama negara sedang berkembang seperti Negara kita sendiri yaitu Indonesia. Ketika perekonomian di Indonesia sedang berkembang pesat, maka akan memicu terhadap kenaikan harga-harga barang atau jasa yang tersedia. Terjadinya fenomena ini, jika tidak segera diatasi dan dikendalikan dengan tepat akan memberikan dampak negatif terhadap kebutuhan barang atau jasa masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya masalah inflasi.

Inflasi merupakan dilema yang akan berdampak buruk bagi perekonomian setiap negara. Perkembangannya yang terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Banyak kajian membahas inflasi, tidak hanya cakupan regional, nasional, namun juga internasional. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian (Baasir., 2003)

Bank Indonesia (BI) mendefinisikan bahwa inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum, tetapi kenaikan harga yang terjadi tidak hanya harga dari satu barang atau jasa saja. Sementara menurut Boediono,(1999) inflasi adalah harga-harga barang yang cenderung untuk naik secara meyeluruh. Jika hanya terjadi pada segelintir barang saja yang mengalami kenaikan harga, maka itu tidak

dapat disebut sebagai suatu fenomena inflasi, kecuali naiknya harga barang tersebut meluas sehingga mempengaruhi semua komoditas seperti dengan kenaikan harga makanan pokok maupun non pokok, rokok, tembakau, harga sandang, harga kesehatan, harga pendidikan, tariff atau tiket masuk pariwisata, harga transportasi (bus, kereta api & angkutan umum), komunikasi, dan jasa keuangan.

Dalam permasalahan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa sasaran yang digunakan sebagai indikator untuk menjaga kestabilan makroekonomi seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi serta terbukanya lapangan pekerjaan. Namun dari ketiga sasaran indikator tersebut yang dilihat secara empiris tidaklah mudah, sehingga menggeser strategi kebijakan moneter pada sasaran tunggal dengan kestabilan harga (Bank Indonesia, 2008). Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak dapat diatasi sampai ke akar-akarnya, hanya sebatas melakukan upaya-upaya untuk mengendalikannya saja. Bank Indonesia pada tahun 2005, menerapkan "inflation targeting" yang digunakan sebagai salah satu strategi pelaksanaan kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga bank Indonesia yang merupakan acuan bagi tingkat bunga perbankan seperti tabungan deposito dan kredit dengan tujuan mempengaruhi jumlah uang beredar yang nantinya akan memberikan perubahan terhadap tingkat inflasi menjadi rendah dan stabil.

Menurut Arimurti., (2011) implementasi Inflation Targeting Framework (ITF) pada tahun 2005 menjadi tonggak sejarah perubahan kerangka kebijakan moneter yang dilakukan pasca krisis ekonomi di Indonesia. Inflation targeting framework (ITF) yaitu strategi kebijakan moneter yang dilakukan dengan memberikan informasi kepada publik mengenai kisaran target dari tingkat inflasi yang akan dicapai dalam

beberapa waktu kedepan, selain itu secara eksplisit ketika inflasi rendah serta stabil merupakan bentuk tujuan utama dari kebijakan moneter jangka panjang. Dalam inflation targeting framework (ITF) terdapat empat prinsip pokok yaitu ITF menjadikan sasaran inflasi sebagai prioritas pencapaian (overriding objective) dan acuan (nominal anchor) kebijakan moneter, ITF bersifat antisipatif (preemptive/forward looking) dalam mengarahkan respon kebijakan moneter yang terjadi sekarang guna mencapai sasaran inflasi di masa mendatang, ITF juga berpacu pada analisis, perkiraan dan kaidah kebijakan tertentu dalam penerapan pertimbangan respon kebijakan moneter (contrained discretion) dan dalam semua penerapan ITF sesuai dengan prinsip tata kelola yang sehat (good governmance) yaitu dengan tujuan yang jelas dan terarah, konsisten, transparan dan berakuntabilitas. Menurut Bank Indonesia dalam Nasution., (2009) pemilihan kerangka kerja kebijakan moneter ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu:

- (i) Memenuhi prinsip kebijakan moneter yang sehat.
- (ii) Sesuai dengan amanat UU No. 23/1999 tentang JEJAK Journal of Economics and Policy 5 (2) (2012): 117-229 129 Bank Indonesia sebagaimana telah diamandemen dengan UU No. 3/2004.
- (iii) Hasil riset menunjukkan semakin sulit pengendalian besaran moneter.
- (iv) Pengalaman empiris negara lain memperlihatkan bahwa negara yang menerapkan kerangka kebijakan ITF berhasil menurunkan inflasi tanpa meningkatkan volatilitas output. Sebagai contoh adalah Selandia Baru.
- (v) Mampu meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia sebagai pengendali inflasi melalui komitmen pencapaian target inflasi.

Sejalan dengan UU no 23 Tahun 1999, Bank Indonesia sejak tahun 2000 mulai menentukan dan mengumumkan sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter. Kemudian tahun 2004, dengan adanya amandemen UU Bank Indonesia no 3 tahun 2004, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan inflasi IHK untuk tahun 2005, 2006 dan 2007. Sasaran ini ditetapkan secara gradual dengan mengarah pada sasaran inflasi jangka menengah dan panjang yang kompetitif sebesar 3 %. Kemudian sejak 1 Juli 2005, Bank Indonesia mengumumkan penerapan ITF secara eksplisit dengan BI rate bulanan sebagai target operasional dengan mulai mengumumkan BI rate sebagai sasaran operasional (Bank Indonesia., 2008).

Menurut Milton Friedman's (Miskhin., 1997) inflasi merupakan fenomena moneter yang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar (M_s), Peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan meningkatannya permintaan terhadap barang dan jasa, yang selanjutnya akan meningkatkan harga, peningkatan konsumsi masyarakat (yang disebabkan peningkatan jumlah penduduk pendapatan perkapita) akan mendorong terjadinya excess demand dan selanjutnya meningkatkan harga-harga. Selain itu dapat meningkatkan investasi, akan mendorong peningkatan terhadap permintaan terhadap bahan baku dan bahan penolong, meningkatkan pendapatan masyarakat, kesemuanya ini akan mendorong peningkatan permintaan, dan peningkatan harga. Kemudian peningkatan pengeluaran Pemerintah (government spending) akan menyebabkan peningkatan terhadap permintaan barang dan jasa dalam perekonomian, sehingga mendorong kenaikan harga.

Teori David Ricardo menyatakan bahwa jumlah atau kuantitas uang yang beredar akan berpengaruh terhadap tingkat harga (Inflasi). Jika jumlah uang beredar tinggi, maka harga barang dan jasa akan naik pula. Begitupun sebaliknya, jika jumlah uang beredar rendah, maka harga barang dan jasa akan turun.

Selain itu, suku bunga acuan bank Indonesia (BI Rate) juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan inflasi di Indonesia. Suku bunga menjadi tolak ukur kegiatan perekonomian suatu negara yang dapat berpengaruh terhadap perputaran arus keuangan perbankan, inflasi, investasi serta pergerakan currency pada suatu negara. Dalam menaikkan dan menurunkan suku bunga harus berpihak dan memprioritaskan pada kesejahteraan rakyat dalam negeri (Kurniasari., 2011). Menurut (Yodiatmaja., 2012) adanya perubahan pada BI Rate dapat memberikan pengaruh beberapa variabel makroekonomi yang selanjutnya diteruskan kepada inflasi. Perubahan seperti peningkatan level BI Rate berguna agar mengurangi laju aktifitas ekonomi yang dapat memicu terjadinya inflasi. Pada saat level BI Rate naik maka suku bunga kredit dan deposito pun juga akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank sehingga jumlah uang yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan merangsang para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya karena biaya modal semakin tinggi. Hal demikianlah yang meredam aktivitas ekonomi dan pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

Menurut beberapa studi terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini diantaranya, penelitian oleh (Agusmianata., 2017) menyatakan bahwa jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di

Indonesia. Hasil penelitian oleh (Sriyani., 2018) menyatakan bahwa suku bunga memiliki dampak secara signifikan (positif) menentukan tingkat inflasi. Penelitian ini berpendapat bahwa tingkat inflasi dalam perekonomian lokal tergantung pada peraturan pemerintah dan perubahan internasional. Kemudian penelitian oleh (Kristiyanti., 2018) berkesimpulan bahwa jumlah uang beredar, suku bunga dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode 2014-2018.

Dari latar belakang diatas yang telah peneliti uraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya laju inflasi yang terus merosot dan relatif rendah di Indonesia periode 2017.1 sampai 2020.6. Pembahasan yang lebih difokuskan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan fluktuasi pada inflasi, terdiri dari variabel-variabel domestik antara lain jumlah uang beredar (M2) dan suku bunga acuan bank Indonesia (BI Rate).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh perubahan jumlah uang beredar (M2) terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode Januari 2017 – Juni 2020 ?
2. Bagaimana pengaruh perubahan BI 7-day reverse repo rate (BI7DRR) terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode Januari 2017 – Juni 2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh dari perubahan jumlah uang beredar (M2) dan BI 7-day reverse repo rate (BI7DRR) terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode Januari 2017 - Juni 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat akademis adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah wawasan (ilmu) maupun informasi bagi pembaca atau peneliti sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi beberapa instansi yang bertugas dalam penetapan suatu kebijakan mengenai pengendalian inflasi di Indonesia